



Peran Pemimpin Agama Berbasis Wawasan Pluralisme Dalam Merawat Toleransi Beragama Di Indonesia

Ondrasi Gea¹⁾, Hanna Dewi Aritonang²⁾, Senida Harefa³⁾

¹Banua Niha Keriso Protestan (BNKP), ^{2,3}Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

geaondrasi@gmail.com, hannadewiaritonang09@gmail.com & senida.harefa@gmail.com

Abstract:

This article departs from reality regarding the existence of cases of conflict to acts of violence with religious motives in Indonesia. Intolerant attitudes are increasingly felt by adherents of certain religions, for example refusing to build houses of worship even though the requirements have been fulfilled, feelings of being disturbed by the worship activities of adherents of other religions, the emergence of narrowly fanatical statements about the celebration of certain religious holidays, the occurrence of hate speech and even religious blasphemy. It turned out that amid these cases of conflict and intolerant religious leaders were also involved. Therefore, the author aims to develop an idea about the role of religious leaders plays a role in maintaining inter-religious harmony in Indonesia, namely by strengthening tolerance based on pluralism insights. This research refers to various literature consist of books, articles, journals and observes events around religious harmony. To build tolerance with a pluralism perspective, religious leaders can organize seminars on pluralism, Pancasila, and ideas that maintain national harmonious and integrity. In addition, adequate religious education for religious leaders can influence attitudes toward the reality of a pluralistic society, especially religious plurality. The deeper the pluralism insight of religious leaders and their adherents, the better the rating of tolerance in Indonesia.

Keywords: *harmony, pluralism insight, religious leaders, tolerance*

Abstrak:

Artikel ini bertolak dari sebuah realita mengenai adanya kasus-kasus konflik hingga tindakan kekerasan dengan motif agama di Indonesia. Sikap intoleran semakin dirasakan oleh penganut agama tertentu, misalnya penolakan pendirian rumah ibadah meskipun persyaratan sudah terpenuhi, perasaan terganggu dengan aktifitas ibadah pemeluk agama lain, timbulnya pernyataan bermuatan fanatik sempit terhadap perayaan hari besar agama tertentu, terjadinya ujaran kebencian bahkan penistaan agama. Ternyata di tengah kasus konflik dan intoleran tersebut, pemuka agama juga turut terlibat. Oleh karena itu, penulis bertujuan untuk mengembangkan sebuah ide tentang peran pemimpin agama merawat kerukunan antar umat beragama di Indonesia, yaitu dengan memperkuat toleransi berbasis wawasan pluralisme. Penelitian ini mengacu pada berbagai sumber literatur antara lain buku, artikel, jurnal dan mengamati peristiwa di sekitar kerukunan beragama. Untuk membangun toleransi berwawasan pluralisme, maka pemuka agama dapat membuat seminar bertajuk pluralisme, pancasila dan gagasan yang menjaga kerukunan serta keutuhan bangsa. Selain itu pendidikan agama yang memadai bagi pemuka agama dapat mempengaruhi sikap terhadap realitas masyarakat majemuk, terutama pluralitas agama. Sehingga semakin dalam wawasan pluralisme pemimpin agama beserta penganutnya, maka semakin baik tingkat toleransi di Indonesia.

Kata-kata kunci: kerukunan, wawasan pluralism, pemimpin agama, toleransi



PENDAHULUAN

Dalam konteks masyarakat Indonesia, kemajemukan merupakan sebuah realitas yang diwarnai oleh beragam suku, bahasa, budaya, adat istiadat, agama dan sebagainya. Di tengah keragaman itu, hidup berdampingan di antara umat yang berbeda agama kerap kali menimbulkan masalah serius. Yang sering mengalami ketegangan dan konflik dengan motif keagamaan adalah antara Islam dan Kristen (Panjaitan, 2016). Di beberapa daerah telah terjadi kasus-kasus intoleransi, kekerasan, fanatisme sempit, sikap radikalisme hingga konflik berdarah. Bahkan peristiwa bom bunuh diri terjadi ketika pemeluk agama tertentu berkumpul, didorong oleh ekstrimisme agama. Sehingga situasi ini menyebarkan perasaan trauma dan keresahan di tengah masyarakat.

Sementara dalam semangat persatuan, keutuhan bangsa merupakan tujuan utama yang harus diwujudkan di tengah kebinekaan. Oleh karena itu kerukunan, kedamaian dan sikap toleran mutlak diperlukan. Kitab Suci Kritek juga menekankan ini: “Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun!” (Mazmur 133:1). Terwujudnya kerukunan pada dasarnya dipengaruhi oleh praktik toleransi dan toleransi tercipta bilamana umat beragama memiliki wawasan pluralisme. Penanaman nilai-nilai pluralisme sangat efektif jika dimulai dari pemimpin yang berpengaruh, seperti pemuka agama, pemerintah, tokoh masyarakat dan lembaga pemerhati kerukunan. Secara khusus, para pemuka agama masih sangat relevan dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi dan realitas kebinekaan sebagai kekayaan yang harus diterima serta dihormati. Alasannya terletak pada pengaruh tokoh agama yang masih dipercaya oleh umat beragama sebagai panutan.

Namun berdasarkan penelitian literatur dan fenomena di lapangan, tidak semua tokoh yang dianggap panutan tersebut memberikan dampak positif bagi upaya merawat kerukunan antar umat beragama. Justru di beberapa media telah muncul ceramah provokatif yang disertai ujaran kebencian, kata-kata hujatan yang berakhir dengan penistaan agama. (Membuka Pintu Langit Momentum Mengevaluasi Perilaku, 2011) Pernyataan para pemuka agama terkadang tidak menyejukkan hati melainkan menyakiti perasaan umat beragama lain. Belum lagi pemeluk agama tertentu begitu sulit mendapat dukungan untuk mendirikan rumah ibadah yang di dalamnya pemimpin agama berperan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Sikap ini diantaranya disebabkan



oleh perbedaan pemahaman terhadap ajaran agama sendiri di pihak internal FKUB yang mayoritas beragama Islam sehingga keberatan mengeluarkan rekomendasi. (Ihsan Ali-Fauzi, 2011). Demikian pula Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyatakan bahwa sikap toleransi masyarakat Indonesia secara umum masih rendah. Dari sepuluh orang, enam diantaranya bersikap keberatan bila rumah ibadah agama lain didirikan. (Mubarok, 2010). Dalam tulisannya, Aliyanto mengutip dokumentasi Singgih Nugroho bahwa dari tahun 2001 hingga 2015 sudah 8 kasus keberatan terhadap pendirian rumah ibadah di Salatiga, Jawa Tengah. (Aliyanto, 2021). Oleh sebab itu menurut Imron, “wawasan pluralitas dan sikap para pemuka agama sangat berperan penting dalam menciptakan suasana yang kondusif. (Imron, 2011)

Akan tetapi harapan itu menjadi terbalik ketika kelompok tertentu termasuk pemuka agama ikut mengeruhkan suasana masyarakat majemuk. Justru yang ditemukan ialah aktor-aktor intoleransi agama semakin menjamur di Indonesia. Fakta ini diperkuat oleh hasil penelitian berbagai lembaga survei dan tim peneliti. Salah satunya ialah Tim Peneliti Yayasan Paramadina, Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik Universitas Gadjah Mada (MPRK-UGM) dan Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) yang dimuat dalam buku *Kontroversi Gereja di Jakarta* melaporkan bahwa aktor kekerasan agama dimulai dari ketua RT/RW, kepala daerah, aparat kepolisian, pemuka agama dan organisasi kemasyarakatan. (Ihsan Ali-Fauzi, 2011). Namun menurut hasil survei Binsar A. Hutabarat dan H. Hans Panjaitan mengenai tingkat toleransi di Indonesia bahwa dari 102 responden, 96,22% setuju pemuka agama yang paling bertanggungjawab memelihara toleransi antar umat beragama di Indonesia. Urutan berikutnya ialah pemerintah, pimpinan daerah, kepala suku dan parpol. (Panjaitan, 2016).

Dengan memperhatikan beragam hasil survei bahwa tokoh agama bertanggungjawab atas pemeliharaan kerukunan antar umat beragama, maka diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh pemimpin agama dalam keikutsertaannya merawat toleransi beragama di Indonesia. Peran strategis yang dapat ditindaklanjuti oleh tokoh-tokoh agama ialah merawat toleransi berbasis wawasan pluralisme agama, memahami hakekat, tujuan dan tindakan konkrit untuk mewujudkannya. Dengan fenomena intoleransi yang melibatkan pemuka agama mengindikasikan bahwa realitas pluralisme agama belum diterima sepenuhnya. Bila



diamati secara mendalam, pluralisme agama dan multikultural ialah modal utama untuk menjaga keutuhan bangsa sebagaimana Made Saihu merumuskan judul bukunya yaitu “Merawat Pluralisme Merawat Indonesia” (Saihu, 2019). Maka, rendahnya wawasan pluralisme akan memberi celah bagi sikap dan tindakan intoleran di tengah keberagaman. Untuk itu, dalam artikel ini penulis akan menguraikan beberapa kejadian intoleransi di Indonesia, mengemukakan akar penyebabnya dan mengembangkan gagasan mengenai upaya yang sebaiknya dilakukan, baik oleh umat beragama terlebih-lebih pemuka agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur, yaitu analisis buku, artikel maupun jurnal yang berkaitan dengan pembahasan judul. Metode kualitatif deskriptif ini akan menggambarkan situasi kerukunan masyarakat di Indonesia dalam pluralitas agama dan bagaimana peran strategis untuk menjaga kerukunan sehingga terhindar dari sikap intoleran. Dengan ini, penulis akan meneliti berita online, media youtube tentang masalah-masalah di sekitar keagamaan. Selanjutnya hasil penelusuran isu dan fenomena sikap yang berkembang dalam masyarakat terhadap kasus-kasus intoleransi beragama akan diuraikan dengan mencari penyebab, menjelaskan dampaknya dan langkah-langkah yang dilakukan sebagai solusi sampai pada kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian-Pengertian

a. Pluralisme

Secara singkat arti kata *plural* ialah jamak atau beragam dan *isme* ialah paham. Jadi pluralisme ialah paham tentang keberagaman atau pandangan mengenai adanya kepelbagaian. (Dzaki, 2014). Maka pluralisme agama berarti suatu paham yang mengakui dan menerima bahwa ada beragam agama di bumi ini. Melalui wawasan pluralisme seseorang akan menjadi toleran. (Dzaki, 2014). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pluralisme adalah keadaan masyarakat yang majemuk (<https://www.kbbi.co.id/arti-kata/pluralisme>)

b. Pemimpin Agama

Pemimpin agama adalah orang-orang yang memimpin sekelompok umat beragama dalam menjalankan kegiatan beribadah atau kegiatan keagamaan yang lain.



(https://id.wikipedia.org/wiki/Pemimpin_agama). Misalnya dalam agama Islam dikenal ustad, imam, ulama, kyai. Dalam agama Kristen dikenal pendeta, hamba Tuhan, ephorus, bishop. Dalam agama Katolik dikenal, pastor, uskup, paus, demikian seterusnya dalam agama lain memiliki sebutan khusus untuk pemimpin agama. Namun menurut penulis, di lembaga pemerintahan, masyarakat dan pendidikan terdapat juga oknum-oknum yang dapat melaksanakan fungsi dari pemuka agama, misalnya dalam memberi wawasan atau pencerahan berdasarkan nilai-nilai keyakinan agama tertentu.

c. Toleransi

Dalam bahasa Inggris kata toleransi disebut dengan *tolerance*, artinya membiarkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia toleransi adalah sifat atau sikap toleran, mendiamkan, membiarkan dan menghargai pendirian berupa pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan yang berbeda (<https://kbbi.co.id/arti-kata/toleransi>). Sedangkan dalam bahasa Latin, disebut *tolerantia*, yang artinya kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran. Dari sini dapat dipahami bahwa toleransi merupakan sikap untuk memberikan hak sepenuhnya kepada orang lain agar menyampaikan pendapatnya, sekalipun pendapatnya salah dan berbeda. (Tren Pluralisme Agama, 2005). Jadi penulis menyimpulkan bahwa toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati kebebasan serta hak-hak orang lain menyangkut segala identitas, pandangan hidup, kepercayaan dan pilihan-pilihannya sebagai manusia sekalipun berbeda dari yang lain.

Jika pengertian pluralisme dan toleransi dihubungkan dengan realita yang terjadi dalam konteks kemajemukan agama di Indonesia, maka wawasan pluralisme serta nilai-nilai toleransi belum sepenuhnya mengakar dalam jiwa pemeluk agama termasuk para pemimpin agama yang dianggap panutan. Keadaan ini dapat diketahui melalui beberapa fenomena yang terjadi di berbagai media dan penelitian tentang masalah-masalah kerukunan antar umat beragama seperti diuraikan berikut ini:

1) *Klaim Kebenaran (Truth Claim)*

Menurut Togardo Siburian, konflik agama sesungguhnya tidak bersumber pada agama, melainkan menganggap keyakinannya paling benar lalu membenci individu lain yang menjadi sumbernya (Togardo, 2014). Pandangan ini sekaligus menegaskan bahwa agama itu baik atau tidak salah melainkan cara manusia



beragama yang keliru. Salah satunya ialah sikap superioritas atau *truth claim* yang sebaiknya dihindari. Istilah lain dari *truth claim* ini ialah singularistik yang menekankan bahwa doktrinnya yang paling benar dan istimewa dari ajaran agama lain. (Wahyuni, 2017). Perasaan superior atas umat beragama lain sebenarnya berpotensi menjadi pemicu tumbuhnya benih-benih intoleransi dan sifat eksklusif yang mengganggu keharmonisan masyarakat majemuk.

2) *Ceramah Keagamaan Yang Provokatif*

Fathi Yakan dalam bukunya yang berjudul “Robohnya Dakwah di Tangan Dai” mengemukakan bahwa di Indonesia ceramah bernada provokatif dimulai dari para da’i yang berwawasan sempit dan pengetahuan agamanya terbatas, tetapi terlalu berani berfatwa di hadapan umat. (Robohnya Dakwah di Tangan Dai (Judul asli: Ihdzaru alAids al-Harakiy), 2011.). Akibatnya penceramah merasa benar sendiri, suka menghakimi dan melecehkan penganut agama lain. Juga beberapa waktu lalu di media youtube, muncul pernyataan seorang ustad bernama ‘UAS’ yang begitu heboh dalam memberi jawaban atas pertanyaan seorang muslim mengenai apa penyebabnya bila menengok salib, hatinya menggigil. Namun tanpa berpikir panjang atau mempertimbangkan perasaan umat beragama lain, penceramah menjawab: “setan...karena di salib itu ada jin kafir...kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia pada waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematian. (Channel, 2019)

Selain provokatif, konten ceramah seperti itu mengandung ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap agama lain. Pernyataan kafir mengkafirkan yang selama ini diungkapkan secara terang-terangan sebenarnya sudah merupakan tindakan intoleran dan menolak realitas kepelbagaian agama di Indonesia. Dampak ceramah provokatif bahkan mengandung unsur penghinaan tersebut, akhirnya mengundang reaksi dan kegaduhan di media sosial karena menyinggung perasaan umat Kristen. Artinya ucapan tersebut memanasakan suasana dan memancing terjadinya konflik antarumat beragama. Demikian halnya dengan sosok Habib Rizieq Shihab yang sangat kontroversial dan provokatif namun difigurkan sebagai imam besar FPI. Selain menyebarkan ujaran kebencian kepada umat beragama yang tidak sepaham dengannya, ungkapan penghinaan tidak segan ditujukannya kepada pemerintah



(Waty, 2021). Salah satu doktrin radikal yang diserukan oleh pimpinan FPI tersebut ialah penegakan syariat islam di Indonesia karena kedudukannya sangat istimewa sebagai pemberian Allah bagi manusia. (Ardiyanti, 2018). Bila disadari, penegakan syariat tersebut berpotensi membahayakan ideologi bangsa dan menolak realitas kemajemukan agama di Indonesia.

3) *Fanatisme Sempit*

Maksud fanatisme sempit ialah paham ekstrim atas hal-hal tertentu, misalnya mengharamkan penyebutan suatu ucapan atau salam terhadap agama lain. Beberapa waktu yang lalu dikabarkan bahwa mengucapkan “Selamat Natal” bagi agama kristen haram hukumnya. Memang ditinjau dari segi aqidah, mengucapkan “Selamat Natal” bagi umat muslim adalah haram. (Hariyant, 2016). Namun sebagai bagian dari upaya membangun kerukunan antarumat beragama serta saling menghormati, mengucapkan “Selamat Natal” tidak dipersoalkan. (Anan, 2020). Lebih ekstrim lagi dalam kasus pemilu DKI Jakarta periode 2017-2022 dengan munculnya kelompok tertentu yang ‘menjual nama agama’ untuk kepentingan politik. Saat itu Basuki Tjahaja Purnama seorang kristen adalah calon gubernur. Fanatisme sempit yang mengemuka saat itu adalah haram hukumnya memilih pemimpin non-muslim. Istilah inilah yang disebut politik identitas. Politisasi agama ditampilkan demi menghadang lawan politiknya. Oknum pemimpin agama juga turut mempropagandakan hal itu atas dalih ajaran agama sehingga umat ikut-ikutan menolak pemimpin dari agama lain, sekalipun motifnya adalah politik. Boleh dikatakan politik identitas atas dasar agama dijadikan senjata untuk mewujudkan politik kepentingan. Tanpa disadari sikap demikian berpotensi memecah belah anak bangsa.

4) *Faham Radikalisme*

Secara bahasa, radikalisme berasal dari kata *radix* yang berarti akar. Jadi, radikalisme dapat diartikan sebagai paham yang menginginkan perubahan sosial dengan cara kekerasan. (Khamid, 2016). Sedangkan radikalisme agama berarti paham fanatisme keagamaan yang sangat tinggi sehingga kekerasan dan tindakan ekstrim dipakai untuk membela ajarannya. Terkait dengan itu Direktur Riset Setara Institute, Halili mengatakan, terdapat 10 perguruan tinggi negeri (PTN) di



Indonesia terpapar paham Islam radikalisme. Hal ini berdasarkan riset yang telah dikerjakan. (<https://tirto.id/setara-institute-sebut-10-kampus-terpapar-paham-radikalisme-d9nh>). Sedangkan Badan Intelijen Negara (BIN) mengatakan ada 50 penceramah yang menyebarkan paham radikal di 41 masjid. Sehingga paham radikalisme kini sudah mulai menyusup di sekolah-sekolah. Radikalisme meningkat karena perilaku toleransi yang rendah. (Putra, 2019). Beberapa waktu lalu terdengar bahwa ada sekolah yang menerapkan budaya agamis tertentu, yaitu pemakaian jilbab kepada agama lain dengan alasan tradisi atau menjaga kearifan lokal. Namun menurut LSM Setara Institute pemberlakuan hal itu adalah tindakan pemaksaan dan perilaku intoleransi. (<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55806826>)

5) *Saling Mencurigai*

Masalah-masalah umat beragama juga disebabkan oleh kecurigaan antar kelompok yang semakin kuat, bahkan tidak jarang hanya gara-gara persoalan sepele, konflik antaragama bisa meletus. (Panjaitan, 2016). Timbulnya kecurigaan tersebut bisa juga dipicu oleh tanggapan atas isu-isu islamisasi atau kristenisasi yang belum jelas kebenarannya. (Arnadi, 2020). Sehingga demi mempertahankan keyakinannya dari pengaruh siapapun maka timbullah rasa curiga atau perasaan tertentu terhadap penganut agama lain. Tanpa disadari, ada kalanya suatu peristiwa dihubungkan dengan agama yang sebenarnya tidak berkaitan sama sekali. Asumsi dan perasaan curiga tidak berdasar ini semestinya dihindari dalam konteks keberagaman.

6) *Keberatan Terhadap Pendirian Rumah Ibadah*

Persoalan izin pendirian rumah ibadah sudah menjadi topik perbincangan sejak terbitnya SKB 2 Menteri Tahun 2006. Dalam peraturan itu, ada 4 hal yang sangat menentukan sebagai syarat pendirian, yaitu jumlah penganut agama pengguna rumah ibadah sebanyak 90 orang disertakan KTP, warga penduduk di sekitar lokasi rumah ibadah sebanyak 60 orang disertakan KTP, rekomendasi tertulis dari Kepala Kantor Departemen Agama dan rekomendasi tertulis dari FKUB. Alih-alih menata kehidupan beragama di tengah kemajemukan, malah di sana-sini terjadi kekerasan, pengrusakan dan penutupan paksa rumah ibadah apalagi gedung-gedung



gereja. Tindakan intoleran semakin menjadi-jadi; menghasut, memprovokasi, merusak dan menganiaya umat beragama lain. Akibat yang ditimbulkannya ialah kerugian materi, korban jiwa, tekanan psikis, ketakutan dan keresahan dalam masyarakat. Alasan dibalik semuanya itu ialah tuntutan terhadap IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Namun penulis memberanikan untuk berpendapat bahwa faktor ketidaksukaan, kebencian, fanatisme dan sikap intoleransi terhadap agama lain juga termasuk penyebabnya. Penyelesaian yang dimediasi oleh pemerintah dan forum keagamaan juga kerap kali berakhir di jalan buntu.

Aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sepenuhnya disalahkan. Namun untuk memenuhi syarat tersebut sangat memberatkan kepada penganut agama minoritas. Apalagi jika bertetangga dengan umat yang berbeda agama tetapi berjiwa fanatik, kemungkinan terasa berat untuk memberi dukungan terhadap pendirian rumah ibadah. Semakin memprihatinkan lagi bila lembaga yang berwenang memberikan rekomendasi, namun oknum di dalamnya berfaham fanatik, radikal dan eksklusif kemungkinan akan menyatakan keberatan-keberatan dan berbagai macam pertimbangan. Misalnya dalam FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama), bila keputusan didasarkan pada asas proporsionalitas dan oknum di dalamnya minim dengan wawasan pluralisme maka rekomendasi akan sulit dikeluarkan. Inilah dilema yang menjadi sebuah polemik dan menuai pro-kontra mengenai aturan tersebut. Tanpa disadari bahwa ada saja pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan aturan-aturan itu untuk meloloskan kepentingannya. Itulah sebabnya muncul petisi untuk mencabut SKB 2 Menteri tentang aturan pendirian rumah ibadah karena dinilai tidak sejalan dengan undang-undang yang mengatur kebebasan beragama. Namun hingga kini, sikap dan kebijakan pemerintah masih ditunggu.

Peran Pemimpin Agama dalam Merawat Toleransi

Berdasarkan peristiwa yang terjadi di sekitar masalah-masalah kerukunan umat beragama, dengan ini penulis mengembangkan sebuah ide untuk merawat toleransi antar umat beragama yang disebut toleransi berwawasan pluralisme. Toleransi berwawasan pluralisme merupakan suatu sikap atau tindakan yang dapat diterapkan di tengah



kemajemukan bangsa ini, terutama oleh para pemuka agama dalam kepemimpinannya. Toleransi berwawasan pluralisme dimaksud antara lain:

Membuat tulisan dan seminar tentang penguatan kerukunan

Topik seminar atau tulisan dimaksud antara lain bertajuk Pancasila, pluralisme agama, toleransi, fanatisme, radikalisme dan sebagainya. Terlebih belakang ini istilah moderasi beragama sangat gencar diserukan dan diseminarkan dalam membangun paradigma baru mengenai cara beragama yang baik dan sehat di era peradaban maju saat ini. Seminar-seminar ini dimaksudkan untuk membuka wawasan mengenai modal bangsa dalam memelihara kerukunan yang harus dipertahankan dan mengenal ancaman-ancaman serta paham-paham yang merusak nilai-nilai toleransi antar umat beragama yang harus dihindari. Semua pihak dapat terlibat aktif mengadakan seminar ini, baik pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan bahkan oknum pemuka agama. Terlebih-lebih di sekolah, sangat efektif bila sejak dini diajarkan kepada siswa nilai-nilai pluralisme agama, wawasan kebangsaan dan ideologi Pancasila. Pembumih Pancasila bagi elemen bangsa dan masyarakat majemuk sejalan dengan cita-cita pemerintah yang telah dicetuskan dalam Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dengan begitu masyarakat mencintai Indonesia dan ideologinya, berarti pula menerima, mengakui, menghargai dan merawat kemajemukan yang ada, termasuk pluralitas agama.

Memahami Agama Sendiri Dan Menerima Keberadaan Agama Lain

Beragama tanpa memahami tujuan dan nilai-nilai agama yang dianut merupakan hal yang patut diwaspadai. Namun ada satu ungkapan yang sering disuarakan oleh semua pemeluk agama, yaitu semua agama mengajarkan kebaikan. Bila semua berpijak atas dasar itu maka umat beragama berlomba-lomba melakukan hal yang baik. Maka konsekuensi logis dari ungkapan tersebut adalah semua tindakan kekerasan, ujaran kebencian, penghinaan, penistaan dan penganiayaan atas nama agama sesungguhnya bukan karena dorongan ajaran agama, melainkan oknum yang berpikir keliru, sempit dan cenderung ekstrim yang melakukan tindakan-tindakan itu. Jadi, memahami tujuan beragama dengan benar dapat mencegah sikap-sikap mengganggu atau mengerdilkan keberadaan agama lain.



Pendidikan Keagamaan Yang Memadai

Gagasan ini bermaksud menekankan bahwa pemuka agama yang memimpin umat dan menyampaikan ceramah keagamaan haruslah seorang yang betul-betul mumpuni. Ini berbicara mengenai prosedur dalam membangun kapasitas seorang pemimpin agama, yaitu melalui pendidikan teologi atau ilmu keagamaan. Misalnya dalam agama kristen seseorang tidak hanya sebatas membaca Alkitab kemudian langsung mengambil khotbah atau ceramah. Tetapi pendidikan teologi dan keagamaan yang memadai sangat diperlukan serta mampu memahami berbagai konteks kehidupan secara holistik, khususnya realitas kemajemukan dan perbedaan-perbedaan yang ada. Artinya yang menjalankan tugas dan fungsi pemimpin agama haruslah yang benar-benar layak untuk itu.

Hermeneutik Kitab Suci Yang Tepat

Penekanan di sini ditujukan kepada bagaimana menafsirkan ulang secara baru teks-teks kitab suci di setiap agama dengan mencari nilai-nilai yang relevan dengan konteks kemajemukan atau kepelbagaian. Kekeliruan menafsirkan teks kitab suci dapat menghasilkan pemahaman yang salah. Sikap fanatisme dan kekerasan terhadap umat beragama lain juga disebabkan oleh legitimasi teks keagamaan dan kultural. (Syahril, 2020). Selain itu, kajian teologis yang dangkal untuk memahami ajaran agama masing-masing bisa mempengaruhi pola sikap terhadap keberadaan umat bergama lain. (Tsafaqah). Oleh karena itu, setiap agama perlu menggumuli ulang teks dan konteks kitab sucinya untuk menjawab persoalan aktual saat ini khususnya sikap terhadap pluralisme agama.

Dalam kitab suci Kristen, Yesus Kristus yang diakui sebagai Tuhan dan Juruselamat ternyata bersikap toleransi terhadap agama lain atau tidak anti terhadap perbedaan sosial, budaya dan agama. Sekalipun Yesus berkata: “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku” (Yohanes 14:6), tidak berarti Yesus langsung menghakimi mereka yang belum menjadi pengikut-Nya. Yesus tidak menjauhi atau bersikap eksklusif terhadap keberagaman bangsa lain di sekitar-Nya, melainkan merangkul dan mengasihi mereka. Yesus menerima keberadaan bangsa-bangsa lain bahkan mengambil contoh yang baik dari bangsa asing itu bagi ajaran moral-etis-Nya, misalnya perumpamaan “orang Samaria yang murah hati”. (Rambitan, 2017)



Perlakuan Yesus terhadap bangsa lain mengajarkan kita untuk menghindari paham partikularistik tetapi menuntun agar semua orang saling menerima dan bersaudara. Ajaran kristiani yang menekankan kasih, hidup damai bagi semua orang, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan bahkan mengasihi musuh merupakan kekayaan nilai yang bisa diterapkan secara universal untuk saling menghargai dan menghormati serta bersahabat bagi semua orang. Demikian juga Rasimin berpendapat bahwa apabila pemeluk agama muslim memahami dengan baik nilai-nilai pluralitas dalam Alquran, semestinya tidak akan terjadi pertikaian dan konflik dengan penganut agama lain (Rasimin, 2016)

Membangun Dialog

Dalam artikelnya, Iman Hanafi mengutip buku Faisal Ismail berjudul “Dinamika Kerukunan Umat Beragama” menguraikan model dialog yang sebaiknya diterapkan di tengah pluralitas agama untuk mencegah konflik, yaitu: *Pertama*, Dialog Parlementer. Bentuk dialog ini melibatkan pemimpin agama tingkat dunia untuk membangun kemitraan dan menjaga kedamaian antarumat beragama. Contohnya The World Congress of Faiths. *Kedua*, Dialog Kelembagaan. Bentuk dialog ini melibatkan organisasi keagamaan untuk menjalin komunikasi dalam menggumuli masalah keumatan. Misalnya dialog MUI, PGI, Walubi, KWI. *Ketiga*, Dialog Teologi, yang bertujuan untuk saling menyampaikan konsep teologis masing-masing agama sehingga pandang subjektif dapat dihindari terhadap agama tertentu. *Keempat*, Dialog dalam Masyarakat, yang bertujuan untuk menjalin kerjasama mengatasi persoalan praktis atau masalah-masalah sosial. *Kelima*, Dialog Kerohanian atau Dialog Iman, yang bertujuan untuk mencari titik temu bukan menitikberatkan perbedaan, sehingga kesalehan ritual menjadi kesalehan sosial. (Hanafi, 2018)

Sifat dialog yang diharapkan ialah autentik dan korelasional, artinya adanya kesetaraan, saling memberi ruang dan saling mendengarkan. Sebaiknya tema-tema dialog tidak mengarah pada pertentangan ajaran atau doktrin agama melainkan menyangkut pergumulan dan tanggungjawab bersama seperti soal-soal humanitas, keprihatinan sosial, keadaban, aksi solidaritas terhadap kemiskinan, membangun nilai-nilai kasih dan kepedulian tanpa mengedepankan perbedaan.



Mencantumkan Pluralisme Agama Dalam Kurikulum Pengajaran Di Setiap Agama

Menanamkan wawasan pluralisme dan nilai-nilai toleransi sangat baik dilakukan sejak dini di setiap penganut agama. Dalam kurikulum pengajaran agama, misalnya di gereja yang mengajarkan sekolah minggu dan katekisasi sangat penting dicantumkan tema-tema mengenai pluralisme agama. Tidak dimaksudkan bahwa jalan keselamatan semua agama adalah sama, tetapi pluralitas agama adalah sebuah fakta yang harus diterima untuk saling menjaga, peduli, mengasihi dan menghormati sesama demi menciptakan kerukunan. Sangat efektif bila pluralitas agama mulai diajarkan dari anak-anak supaya menjadi kebiasaan baik di kemudian hari. Peran pemimpin agama, misalnya dalam kristen yaitu pendeta, hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu sangat diharapkan untuk menjalankan upaya-upaya tersebut. Nilai-nilai yang diajarkan ialah kasih, saling menghargai dan menghormati, saling membantu, tidak memaksakan kehendak, tidak menghina keyakinan, agama, ras atau budaya yang lain.

KESIMPULAN

Dalam konteks keberagaman agama di Indonesia, toleransi berbasis wawasan pluralisme agama sangat perlu dimiliki oleh semua pemimpin agama tanpa kecuali. Pentingnya wawasan pluralisme agama diletakkan dalam kerangka merawat toleransi antar umat beragama di Indonesia sehingga terjaga kerukunan dan keutuhan masyarakat majemuk. Fungsi wawasan pluralisme agama bertujuan bukan menyamakan agama atau meniadakan identitas keagamaan apalagi mencampuri ajaran agama lain tetapi untuk menjaga keharmonisan serta hubungan yang baik antar umat beragama. Dengan demikian pemeluk agama yang satu menghormati dan mengasihi pemeluk agama yang lain tanpa mencampuri pilihan agama dan ajarannya.

Oleh karena itu, peran pemimpin agama dalam merawat kerukunan berbasis wawasan pluralisme akan menghindari sikap dan tindakan intoleran, yaitu klaim kebenaran, ceramah provokatif, ujaran kebencian, saling mencurigai, paham radikalisme dan fanatisme sempit serta sikap keberatan terhadap berdirinya rumah ibadah agama lain bila sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Toleransi beragama berbasis wawasan pluralisme ini sejalan dengan revolusi mental yang digaungkan oleh pemerintah dalam menciptakan pembaharuan di segala bidang. Gerakan revolusi mental ini harus dimulai dari pemimpin baru kemudian merambat kepada seluruh elemen masyarakat. Sekalipun



begitu banyak aturan, hukum, undang-undang, regulasi dan sistem kebijakan yang dibangun namun tanpa revolusi mental akan sulit tercipta perubahan dan kemajuan. Demikian juga dengan para pemimpin agama, tanpa pembaharuan diri sendiri dan wawasan keagamaan yang memadai serta terbuka, maka tidak akan berdampak baik dalam kehidupan umat beragama apalagi merawat kerukunan.

Dari seluruh pembahasan di atas, peran pemuka agama melalui penerapan toleransi berbasis wawasan pluralisme merupakan salah satu upaya efektif untuk menjaga kerukunan beragama yang sehat dan berkelanjutan. Untuk itu, pemimpin agama perlu menyadari tanggungjawabnya di negeri ini, karena di berbagai lembaga pemimpin agama bergerak, misalnya di tempat ibadah, di dalam FKUB, di lembaga pendidikan, di sekolah-sekolah dan lembaga pemerintahan. Di samping pemimpin agama berpengaruh di banyak lembaga dan diyakini sebagai panutan, kapasitas tersebut juga sedang diuji dalam komitmennya sebagai hamba-hamba Allah. Sebab konsekuensi logisnya ialah apabila pemuka agama menyalahgunakan fungsi, kapasitas dan panggilannya, maka umat yang diasuhnya ikut-ikutan terjerumus ke dalam pemahaman yang keliru bahkan ekstrim. Terlebih-lebih pemimpin agama yang dirasuki oleh kepentingan kelompok atau pilihan politik, bisa kemungkinan memanfaatkan kapasitas itu untuk menggiring umat kepada politik identitas, faham fanatik, eksklusif dan intoleran demi mencapai tujuannya.

Setiap pemimpin agama penting memahami wawasan beragama dalam agamanya sendiri dengan benar dan memiliki pandangan terbuka terhadap realitas agama lain. Inilah yang disebut wawasan pluralisme, bahwa apa yang diyakini dalam agamanya ialah benar dan apa yang diyakini dalam agama lain juga adalah benar. Dengan demikian tidak terjadi sikap memaksakan kebenaran agama yang satu kepada yang lain. Terlebih-lebih pandangan superioritas agama tidak baik untuk dipertahankan. Sehingga semua agama bebas melaksanakan kegiatan keagamaannya tanpa tekanan dan ketakutan melainkan penuh dengan kedamaian. Pemimpin agama manapun harus mengenal fungsi, tugas dan panggilannya di tengah pluraritas agama, yaitu menghadirkan kesejukan, merajut kebersamaan, memberi pencerahan yang membangun dan mengutamakan kemaslahatan umat dalam bingkai persatuan dan kesatuan sebagai sesama anak bangsa.

Setelah pembahasan artikel ini penulis juga memberi saran bahwa tema mengenai toleransi beragama berbasis wawasan pluralisme ini sebaiknya terus diperdalam dan



dikembangkan oleh agama-agama dalam paradigma merawat keharmonisan antar umat beragama di Indonesia, baik secara internal maupun terhadap pemeluk agama lainnya. Sehingga tidak ada keraguan menerima realitas pluralisme agama untuk menjaga keutuhan bangsa. Bagi peneliti berikutnya sebaiknya melakukan penelitian lebih mendalam lagi baik secara literatur maupun penelitian lapangan dalam suatu wilayah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang sudah memberi pemikirannya melalui tulisan dalam beragam literatur tanpa menyebutkan satu per satu yang ada hubungannya dengan kasus-kasus kerukunan antar umat beragama di Indonesia dan kepada pihak yang telah memberi sumbang saran terhadap artikel ini. Terima kasih juga kepada tim Jurnal Teologi Cultivation IAKN Tarutung sehingga artikel ini bisa dipublish.

DAFTAR PUSTAKA

- (2011.). In Y. Fathi, *Robohnya Dakwah di Tangan Dai (Judul asli: Ihdzaru alAids al-Harakiy)* (pp. 52-69). Solo: Era Adicitra Intermedia.
- Dilema pendirian rumah ibadat dan keragaman faham keagamaan. (2010). *Harmoni Jurnal Multikultural & Multireligius. Volume IX, Nomor 35, Juli-September Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI*, 43.
- (2005). In A. M. Thoha, *Tren Pluralisme Agama* (p. 212). Jakarta: Perspektif.
- (2011). In A. M. Bisri, *Membuka Pintu Langit Momentum Mengevaluasi Perilaku* (p. 4). Jakarta: Kompas.
- Aliyanto, D. N. (2021). Menimbang Regulasi SKB 2 Menteri Dalam Terang Sejarah Gereja. . *Jurnal Teologi Biblika dan Praktika, Volume 2 No.1 Juli* .
- Anan, L. M. (2020). Respon Guru Madrasah Diniyah Terhadap Pengucapan Selamat Hari Besar Agama Di Pondok Pesantren Ngalah Pasuruan . *Journal Multicultural of Islamic Education Volume 4 Nomor 1 Oktober Program Magister Pendidikan Agama Islam FAI*.
- Ardiyanti, A. N. (2018). Dakwah Humanis Sebagai Upaya Penanggulangan Radikalisme Di Indonesia . *Jurnal Tabligh Volume 19 No 2 Desember*, 191.
- Arnadi. (2020). *Implementasi Pendidikan Agama Islam Dalam Membudayakan Sikap Pluralisme Agama Pada Peserta Didik*. Jawa Tengah: Penerbit CV. Pena Persada.



- Channel, A. (2019). *di salib ada jin kafir / ustad abdul somad*.
<https://www.youtube.com/watch?v=ox4-u8b-oec> viral !!!
- Dzokie, F. (2014). Meluruskan Pemahaman Pluralisme Dan Pluralisme Agama Di Indonesia . *Al-AdYaN/Vol.IX, NO.1 Januari-Juni*, 81.
- Hanafi, I. (2018). Agama dalam Bayang-Bayang Fanatisme TOLERANS. *Media Komunikasi umat Beragama Vol. 10, No. 1, Januari – Juni*, 59.
- Hariyant, B. (2016). Pengucapan ‘Selamat Natal’ Oleh Umat Islam Kepada Umat Kristiani Perspektif Filsafat Hukum Islam . *Qiyas Jurnal Hukum Islam dan Peradilan Vol 1 No. 1 April* .
- (n.d.). https://id.wikipedia.org/wiki/Pemimpin_agama .
- <https://kbbi.co.id/arti-kata/toleransi>. (n.d.).
- (n.d.). <https://tirto.id/setara-institute-sebut-10-kampus-terpapar-paham-radikalisme-d9nh>.
- (n.d.). <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55806826> .
- (n.d.). <https://www.kbbi.co.id/arti-kata/pluralisme> .
- Ihsan Ali-Fauzi, S. R. (2011). *Kontroversi Gereja di Jakarta*. Yogyakarta: Center for Religious & Cross-cultural Studies.
- Imron, A. (2011). Kearifan Lokal Hubungan Antar Umat Beragama Di Kota Semarang. *Riptek 5, no. 1*, 7-8.
- Khamid, N. (2016). Bahaya Radikalisme terhadap NKRI. *Millati, Journal of Islamic Studies and Humanities*, 134.
- Mubarok, H. (2010). Memahami Kembali Arti Keragaman: Dimensi Eksistensial, Sosial dan Institusional. *Harmoni : Jurnal Multikultural & Multireligius. Volume IX, Nomor 35, Juli-September Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI*, 43.
- Panjaitan, B. A. (2016). Tingkat Toleransi Antaragama di Masyarakat Indonesia. *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat Volume 3, No. 1*, 12.
- Putra, D. R. (2019). Fanatisme Dan Taklid (Memfigurkan Sosok Tertentu Secara Eksklusif) Ditinjau Dari Kepemimpinan Sosial . *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu* , 251.
- Rambitan, S. R. (2017). *Shanan : Jurnal Pendidikan Agama Kristen Vol. 1 No. 1 . Pluralitas Agama Dalam Pandangan Kristen*, 100.
- Rasimin. (2016). Toleransi dan kerukunan Umat Beragama Di Masyarakat Banduacir, Injct: Interdisciplinary . *Journal Of Communication, Volume 1, No. 1, Juni*, 102.



- Saihu, M. (2019). *Merawat Pluralisme Merawat Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama) Anggota IKAPI (076/DIY/2012).
- Syahril, A. A. (2020). Literasi Paham Radikalisme di Indonesia. *Penerbit CV. Zigie Utama Anggota IKAPI Nomor 003/Bengkulu/*.
- Thoha, A. M. (2005). *Tren Pluralisme Agama*. Jakarta: Perspektif.
- Togardo, S. (2014). Manusia, Agama, dan Masyarakat: Suatu Wacana Menuju Dialog Multi Peradaban Global. *Jurnal Societas Dei Volume 1, no. 1*, 191.
- Tsafaqah. (n.d.). Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf al-Qardhaw. *Journal Peradaban Islam, Vol. 13 No. 2*, 257.
- Wahyuni, D. (2017). Agama Sebagai Media dan Media Sebagai Agama. *JIA nomor 2 Vol. 1*, 83 .
- Waty, R. R. (2021). Landasan Sikap Oposisi Front Pembela Islam (FPI) Terhadap Pemerintahan Joko Widodo Tahun 2014-2020 . *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jisi> Vol. 2, No. 2*.